

KOMUNIKASI POLITIK DALAM KONTEKS SEJARAH

Nazala Noor Maulany¹, Sayu Kadek Jelantik²
 Universitas Islam Negeri Mataram¹
 Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram²
nazalanm@uinmataram.ac.id, sayujelantik@gmail.com

Abstract

Keywords :
 Communication;
 Political; History

Political communication in a historical context views human life as inseparable from its activities. The aim of this research is to describe the dynamics of the history of political communication in Indonesia. The method used is descriptive qualitative. The history of political communication in Indonesia starts from the Colonial Era, political communication in Indonesia was limited by the colonial government's control over media and information. Nevertheless, the nationalist movement began to use print media, such as newspapers, as a means of spreading the idea of independence. History of political communication in the Era of the Struggle for Independence, political communication became crucial in forming unity and a spirit of resistance against colonialists. Radio Republik Indonesia (RRI) emerged as an important communication channel in this period. In the history of political communication in the Old Order Era, political propaganda was the main tool in forming public opinion. Political speeches in stadiums and the use of mass media such as newspapers and radio are used to convey political messages. The history of political communication in the New Order, the government had complete control over the media. Suharto's speeches and emphasis on "Pancasila as the state ideology" became the dominant pattern in political communication. Television became the main tool for conveying government messages. History of political communication in the Reform Era, Indonesia experienced significant changes in political communication. Mass media developed rapidly, and freedom of expression was increasingly recognized. More open general elections and more plural political dynamics encourage an increase in the role of the media in shaping public opinion.

Abstrak

Kata Kunci :
 Komunikasi;
 Politik; Sejarah

Komunikasi politik dalam konteks sejarah memandang kehidupan manusia tidak akan bisa terlepas dari aktivitasnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dinamika sejarah komunikasi politik yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Sejarah komunikasi politik di Indonesia dimulai dari Era Kolonial, komunikasi politik di

Indonesia terbatas oleh kontrol pemerintah kolonial terhadap media dan informasi. Meskipun demikian, gerakan nasionalis mulai menggunakan media cetak, seperti surat kabar, sebagai sarana menyebarkan ide kemerdekaan. Sejarah komunikasi politik pada Era Perjuangan Kemerdekaan, komunikasi politik menjadi krusial dalam membentuk kesatuan dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Radio Republik Indonesia (RRI) muncul sebagai saluran komunikasi yang penting pada periode ini. Sejarah komunikasi politik pada Era Orde Lama, propaganda politik menjadi alat utama dalam membentuk opini publik. Pidato politik di stadion dan penggunaan media massa seperti surat kabar dan radio digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Sejarah komunikasi politik pada Orde Baru, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap media. Pidato Soeharto dan penekanan pada "Pancasila sebagai ideologi negara" menjadi pola dominan dalam komunikasi politik. Televisi menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan pemerintah. Sejarah komunikasi politik pada Era Reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi politik. Media massa berkembang pesat, dan kebebasan berpendapat semakin diakui. Pemilihan umum yang lebih terbuka dan dinamika politik yang lebih plural mendorong peningkatan peran media dalam membentuk opini publik.

PENDAHULUAN

Sejarah menjadi kunci pemahaman terhadap evolusi kebijakan, ideologi, dan dinamika kekuasaan, dalam konteks politik. Namun, sejarah bukanlah sekadar kumpulan fakta dan tanggal, melainkan peta jalan yang memandu kita untuk memahami bagaimana komunikasi politik telah membentuk dan merefleksikan perubahan dalam suatu masyarakat. Komunikasi politik, sebagai medan di mana ide, pandangan, dan aspirasi politik diutarakan dan diterima, memainkan peran sentral dalam membentuk arah politik suatu negara. Dalam konteks sejarah, melacak perjalanan komunikasi politik memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pemimpin berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana pesan politik disampaikan, dan bagaimana opini publik dipengaruhi. (Heryanto & Rumar, 2013) dan (Eny Inti Suryani, 2018) menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang terjadi di dalam ranah politik. Konsep komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dipaparkan pada beberapa jurnal (Jelantik & Astraguna, 2023), (Jelantik, 2021), (Jelantik, 2022) menegaskan bahwa pada proses komunikasi terdapat komunikator sebagai pengirim pesan, komunikan sebagai penerima pesan, dan ada pesan berupa informasi politik yang disampaikan tentang kebijakan, pemimpin politik, partai politik, atau topik politik lainnya kepada masyarakat atau sekelompok orang. Komunikasi politik sangat penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan partisipasi politik masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap komunikasi politik memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan demokrasi dan partisipasi warga negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami komunikasi politik yakni Membangun Kesadaran Politik dengan pemahaman terhadap komunikasi politik membantu membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Ini termasuk pemahaman terhadap isu-isu politik, proses kebijakan, dan dinamika politik lokal maupun global. Penilaian Informasi dalam era informasi yang berlimpah, masyarakat perlu memiliki keterampilan untuk menilai informasi politik dengan kritis. Pemahaman komunikasi politik memungkinkan masyarakat mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya dan membedakan antara fakta dan opini. Partisipasi aktif Masyarakat yang memahami komunikasi politik lebih cenderung terlibat secara aktif dalam proses politik. Mereka dapat lebih efektif berpartisipasi dalam pemilihan umum, kampanye politik, dan kegiatan politik lainnya. Pemilihan yang Informatif: Pemahaman terhadap komunikasi politik memungkinkan warga negara membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih pemimpin atau mendukung kebijakan tertentu. Ini memperkuat dasar demokrasi, di mana keputusan politik diambil berdasarkan pemahaman dan kepentingan warga.

Pembentukan opini publik yang sehat dimana komunikasi politik memainkan peran kunci dalam membentuk opini publik. Ketika masyarakat memahami proses ini, mereka dapat mengembangkan opini publik yang lebih sehat, didasarkan pada informasi yang benar dan pemahaman yang mendalam. Menyadari hak dan tanggung jawab warga negara dengan membentuk pemahaman komunikasi politik membantu masyarakat menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Mereka dapat lebih efektif mengajukan pertanyaan, menyuarakan pendapat, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin politik. Mengurangi manipulasi politik, dengan memahami taktik komunikasi politik, masyarakat lebih mampu mengenali upaya manipulasi politik atau propaganda. Ini memperkuat resistensi terhadap penyebaran informasi yang bersifat menyesatkan atau manipulatif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan pemahaman komunikasi politik mendukung tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat yang teredukasi tentang komunikasi politik cenderung lebih kritis terhadap tindakan pemerintah dan lebih aktif dalam mendukung transparansi. Dengan demikian, pemahaman komunikasi politik bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat dalam membangun dan memelihara sistem politik yang demokratis dan responsif. Pentingnya komunikasi politik di era kekinian dipaparkan pada jurnal (Budyono, 2015) di tengah revolusi media dan perubahan sosial yang cepat, penting untuk menjernihkan jejak

sejarah komunikasi politik. Pemilihan umum, konflik politik, perubahan ideologi, dan dinamika masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari narasi ini. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis evolusi komunikasi politik dalam sejarah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, dan merinci dampaknya terhadap dinamika politik kontemporer. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini tidak hanya akan membedah catatan sejarah komunikasi politik, tetapi juga merinci bagaimana perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik saling terkait dan saling memengaruhi. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran komunikasi politik dalam membentuk arus sejarah politik suatu masyarakat. Dengan latar belakang ini, penelitian ini diawali dengan mengeksplorasi konteks sejarah komunikasi politik sebagai landasan bagi pemahaman mendalam tentang bagaimana dinamika politik dan komunikasi saling berkaitan. Penelitian relevan yang digunakan menggunakan 5 jurnal yakni (Tobroni, 2017), (Budiyono, 2015), (Eny Inti Suryani, 2018), (Suparno, 2014), (Jelantik, 2020), dengan persamaan jurnal yakni pada kajian komunikasi politik dan perbedaan pada objek kajian penelitian ini yang berfokus pada komunikasi politik dalam konteks sejarah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yakni mengkaji fenomena komunikasi politik dalam konteks sejarah yang terjadi di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yang di deskripsikan menggunakan narasi yang telah ditelaah menggunakan teori pada data yang dihasilkan dengan sumber data. Metode penelitian komunikasi politik dalam konteks sejarah melibatkan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki perkembangan komunikasi politik dari masa ke masa. Metode penelitian yang dapat diterapkan dalam studi komunikasi politik dengan fokus sejarah yakni analisis konten sejarah metode ini melibatkan penelitian dokumen, seperti surat kabar, rekaman pidato, atau materi cetak lainnya dari periode sejarah tertentu. Analisis konten membantu mengidentifikasi pola komunikasi politik, pergeseran opini publik, dan peran media massa dalam konteks sejarah. Penelitian menggunakan pendekatan analisis naratif untuk memahami bagaimana cerita politik dijalani selama periode waktu tertentu, Ini dapat mencakup narasi dari pidato politik, liputan media, atau dokumentasi sejarah lainnya. Penelitian melibatkan pemilihan satu atau beberapa peristiwa sejarah yang relevan dengan komunikasi politik untuk dianalisis secara mendalam. Studi kasus dapat membuka wawasan tentang cara komunikasi politik memainkan peran dalam perubahan sosial dan politik. Wawancara dengan saksi mata yang melibatkan wawancara dengan individu yang memiliki

pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam tentang periode sejarah tertentu. Wawancara ini dapat memberikan pandangan yang lebih dalam tentang komunikasi politik yang terjadi pada waktu itu. Analisis visual sejarah dengan fokus pada analisis elemen visual seperti gambar, poster, atau materi grafis lainnya yang berkaitan dengan komunikasi politik. Analisis visual dapat membantu memahami bagaimana pesan politik disampaikan melalui media visual pada masa lalu. Penelitian ini melibatkan analisis retorika dari pidato politik atau teks komunikasi politik lainnya. Penelitian retorika membahas bagaimana pemilihan kata, struktur pidato, dan gaya bahasa digunakan untuk memengaruhi opini publik. Penggunaan sumber arsip seperti dokumen resmi pemerintah, rekaman pertemuan, atau catatan sejarah lainnya untuk meneliti komunikasi politik pada masa lalu. Penelitian terhadap jaringan politik dan hubungan antara pemimpin politik, kelompok, atau partai selama periode sejarah tertentu. Penting untuk mencocokkan metode penelitian dengan pertanyaan penelitian yang spesifik dan tujuan penelitian. Kombinasi berbagai metode juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kompleksitas komunikasi politik dalam konteks sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi politik dalam konteks sejarah merujuk pada proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berkaitan dengan ranah politik sepanjang waktu. Ini mencakup cara pesan politik disampaikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat pada periode sejarah tertentu. Dalam pemahaman ini, komunikasi politik tidak hanya melibatkan pemerintah dan pemimpin politik, tetapi juga seluruh dinamika politik dalam suatu masyarakat. Sejarah komunikasi politik mencerminkan perubahan-perubahan dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk opini politik selama berabad-abad. Beberapa aspek utama dari pengertian komunikasi politik dalam konteks sejarah melibatkan perubahan teknologi komunikasi dengan seiring berjalannya waktu, teknologi komunikasi telah berkembang dan memengaruhi cara komunikasi politik terjadi. Dari penggunaan surat kabar pada era kolonial hingga media massa dan internet pada zaman modern, perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika komunikasi politik. Perkembangan media massa mengkaji sejarah komunikasi politik mencakup perkembangan media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet. Setiap perkembangan media membawa dampak pada cara pesan politik disampaikan dan diakses oleh masyarakat.

Pergeseran dalam gaya komunikasi politik yang mengalami perubahan sepanjang sejarah. Dari pidato-pidato panjang pada masa perjuangan kemerdekaan hingga penggunaan media sosial dan soundbite dalam politik kontemporer, pola dan gaya komunikasi politik terus

berkembang. Partisipasi masyarakat yang masuk ke dalam sejarah komunikasi politik mencerminkan perubahan dalam partisipasi masyarakat. Dari partisipasi terbatas pada masa kolonial hingga partisipasi yang lebih aktif dan inklusif pada era demokrasi modern, komunikasi politik memainkan peran dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi publik. Pembentukan opini publik dalam komunikasi politik di sepanjang sejarah juga terkait erat dengan pembentukan opini publik. Melalui media dan dialog politik, masyarakat membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap isu-isu politik dan pemimpin (Tobroni, 2017).

Krisis dan perubahan politik dalam komunikasi politik menjadi kunci selama krisis politik dan perubahan rezim. Cara pesan disampaikan selama masa-masa krisis dapat memengaruhi dukungan publik dan arah politik yang diambil. Pengaruh Politik Identitas: Faktor politik identitas, seperti suku, agama, dan kelas sosial, juga menjadi bagian penting dari sejarah komunikasi politik. Bagaimana politik identitas diartikulasikan dan dimanfaatkan dalam komunikasi politik mencerminkan konteks sejarah tertentu. Dengan memahami sejarah komunikasi politik, kita dapat melihat evolusi dan perubahan dalam cara pesan politik dipahami dan memberikan kontribusi pada pembentukan struktur politik dan sosial suatu masyarakat (Ismail, 2010).

Sejarah komunikasi politik dimulai dari era kolonial dimana Pada masa penjajahan Belanda, komunikasi politik di Indonesia terbatas oleh kontrol pemerintah kolonial terhadap media dan informasi. Meskipun demikian, gerakan nasionalis mulai menggunakan media cetak, seperti surat kabar, sebagai sarana menyebarkan ide kemerdekaan. Sejarah komunikasi politik di Indonesia memang dimulai dari masa kolonial, ketika Indonesia merupakan bagian dari Hindia Belanda. Pada periode ini, sejumlah perkembangan penting dalam komunikasi politik terjadi. Media cetak awal pada masa kolonial, komunikasi politik dimulai melalui media cetak, khususnya surat kabar. Surat kabar pertama di Hindia Belanda adalah "Bataviasche Nouvelles" yang terbit pada tahun 1744. Meskipun lebih bersifat komersial daripada politis pada awalnya, surat kabar menjadi saluran untuk menyampaikan ide-ide politik dan membangun kesadaran nasionalis. Beberapa tokoh terkemuka seperti Kartini dan Ki Hajar Dewantara mengakui peran pendidikan sebagai alat komunikasi politik. Mereka menggunakan tulisan dan pendidikan untuk menyebarluaskan ide-ide politik, seperti keinginan akan kemerdekaan dan peningkatan pendidikan bagi rakyat. Pada abad ke-20, munculnya partai politik dan organisasi nasionalis, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Taman Siswa, membawa dimensi baru dalam

komunikasi politik. Partai politik menjadi platform untuk menyampaikan tujuan dan visi politik, sementara organisasi nasionalis mengadopsi strategi berbasis massa.

Pada awal abad ke-20, muncul usaha untuk membangun kesadaran nasional melalui bahasa. Gerakan kebangsaan memandang pentingnya bahasa nasional sebagai alat untuk memperkuat identitas dan kesatuan nasional. Radio dan komunikasi massa pada tahun 1923, Belanda memperkenalkan siaran radio di Hindia Belanda. Radio menjadi alat baru yang digunakan dalam komunikasi politik. Pada masa ini, pesan politik dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Penggunaan Seni dan Sastra: Selain media cetak, seni dan sastra juga menjadi sarana komunikasi politik. Para penulis dan seniman menggunakan karya-karya mereka untuk menyuarakan aspirasi politik dan membangun semangat perjuangan. Peran Tokoh Pemikir: Tokoh-tokoh pemikir seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir memainkan peran penting dalam mengartikulasikan dan menyebarkan ide-ide politik. Pidato-pidato mereka dan tulisan-tulisan menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sejarah komunikasi politik di Indonesia terus berkembang, terutama setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Pada era pascakolonial, media massa terus tumbuh, perkembangan teknologi komunikasi menjadi lebih canggih, dan dinamika politik semakin kompleks. Sejarah ini mencerminkan evolusi komunikasi politik yang terus berlanjut hingga zaman modern.

Sejarah komunikasi politik kedua pada era perjuangan kemerdekaan (Ismail, 2010) Selama Perang Dunia II dan masa perjuangan kemerdekaan, komunikasi politik menjadi krusial dalam membentuk kesatuan dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Radio Republik Indonesia (RRI) muncul sebagai saluran komunikasi yang penting pada periode ini. Era Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia, yang meliputi periode waktu dari pertengahan 1940-an hingga 17 Agustus 1945, merupakan fase kritis dalam sejarah komunikasi politik di negara ini. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam sejarah komunikasi politik pada era perjuangan kemerdekaan: Penggunaan media cetak dan radio menjadi sarana komunikasi politik yang sangat penting. Surat kabar dan majalah seperti "Pemuda Indonesia" dan "Indonesia Merdeka" digunakan untuk menyebarkan ide-ide kemerdekaan dan semangat perjuangan. Pidato dan orasi menjadi sarana komunikasi politik utama. Pemimpin-pemimpin seperti Soekarno dan Mohammad Hatta sering memberikan pidato yang memotivasi dan mengajak rakyat untuk bersatu dalam perjuangan menuju kemerdekaan

Radio Republik Indonesia (RRI) didirikan pada 11 September 1945 dan segera menjadi platform penting dalam komunikasi politik. RRI menyampaikan berita, pidato, dan lagu-lagu

patriotik untuk memotivasi dan menyatukan rakyat. pentingnya Simbol dan Lambang: Selama Era Perjuangan Kemerdekaan, simbol dan lambang memiliki peran penting dalam komunikasi politik. Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (bersatu dalam perbedaan) digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan semangat perjuangan. Berbagai organisasi politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Sarekat Islam, dan Muhammadiyah berkolaborasi dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menyatukan komunikasi politik mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bahasa Indonesia ditingkatkan menjadi alat komunikasi politik yang kuat. Pemakaian bahasa ini mendukung pembentukan identitas nasional dan mengatasi perbedaan etnis dan keberagaman bahasa di Indonesia. Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1945 dimana Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, yang memainkan peran penting dalam membangun jejaring diplomasi dan mengkomunikasikan tekad negara-negara di Asia dan Afrika untuk meraih kemerdekaan dan mengakhiri kolonialisme. Tokoh-tokoh perempuan seperti Kartini dan RA. Kartini memberikan kontribusi dalam menyebarkan ide kemerdekaan melalui tulisan dan perjuangan mereka dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Era perjuangan kemerdekaan menandai periode di mana komunikasi politik di Indonesia menjadi alat utama untuk memobilisasi rakyat dan menyuarakan tekad merdeka. Strategi komunikasi yang digunakan pada masa ini membentuk dasar bagi pengembangan komunikasi politik yang lebih lanjut dalam sejarah Indonesia.

Sejarah komunikasi politik ketiga pada era orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno terjadi propaganda politik menjadi alat utama dalam membentuk opini publik. Pidato politik di stadion dan penggunaan media massa seperti surat kabar dan radio digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Era orde lama di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Soekarno, memiliki dinamika komunikasi politik yang khas. Komunikasi politik pada masa ini ditandai dengan dominasi pidato dan retorika Soekarno, presiden pertama Indonesia. Pidato Soekarno, yang seringkali penuh semangat dan visioner, menjadi sarana untuk menyampaikan ideologi nasionalis, seperti "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Konsep Nasionalisasi dan Politik Ekonomi: Pada awal era orde lama, terjadi proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan kebijakan ekonomi sosialis. Komunikasi politik digunakan untuk meyakinkan masyarakat akan pentingnya langkah-langkah tersebut dalam mencapai kemerdekaan ekonomi dan politik. Soekarno menggunakan seni dan budaya sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide politiknya. Festival

seni dan budaya, seperti kongres kebudayaan, menjadi platform untuk mempromosikan nasionalisme dan identitas Indonesia.

Komunikasi politik juga disalurkan melalui sistem pendidikan. Program pendidikan diarahkan untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat. Media massa terkendali: meskipun ada kebebasan pers yang dinyatakan dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya, media massa di bawah kendali pemerintah. Soekarno menggunakan media massa untuk mempromosikan ideologi Nasakom dan memperkuat kepemimpinan nasional. Pada pertengahan era orde lama, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada stabilitas politik. Komunikasi politik digunakan untuk meredam ketegangan dan menjelaskan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung gerakan non-blok dipromosikan melalui komunikasi politik. Soekarno secara aktif berkomunikasi dengan dunia internasional dan menjadi tokoh sentral dalam gerakan non-blok. Pemerintah menggunakan seni propaganda, termasuk poster dan patung-patung monumental, untuk memperkuat ideologi dan mendukung kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat aspek-aspek positif dalam periode ini, seperti upaya untuk membangun identitas nasional, namun juga terdapat kendala-kendala seperti ketidakstabilan ekonomi dan pendekatan otoriter dalam mengelola politik. Pada tahun 1966, Indonesia mengalami perubahan besar dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S) yang mengakhiri era orde lama dan membuka pintu bagi era orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Sejarah komunikasi politik keempat pada orde baru (Ahmadin, 2022) menjelaskan pada masa orde baru di bawah Soeharto, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap media. Pidato Soeharto dan penekanan pada "Pancasila sebagai ideologi negara" menjadi pola dominan dalam komunikasi politik. Televisi menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan pemerintah. Era orde baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, memiliki ciri khas dalam sejarah komunikasi politik. Salah satu ciri utama orde baru adalah kontrol yang ketat terhadap media massa. Pemerintah memegang kendali penuh terhadap stasiun televisi, radio, dan surat kabar. Ini memastikan bahwa pesan-pesan pemerintah mendominasi pemberitaan dan program-program media. Pemerintah orde baru menekankan ideologi pembangunan sebagai fondasi komunikasi politiknya. Pesan pembangunan ini mencakup pencapaian ekonomi dan stabilitas politik di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada awal orde baru, ideologi sosialisme terpimpin diperkenalkan sebagai panduan pembangunan nasional. Pesan ini diintegrasikan dalam program-program pemerintah dan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pidato-pidato Soeharto.

Pendidikan politik menjadi bagian penting dalam komunikasi politik orde baru. Program-program pendidikan dan pelatihan diperluas untuk membentuk loyalitas terhadap rezim dan membangun kepemimpinan yang setia. Pada orde baru, terjadi kultus kepribadian terhadap Soeharto. Propaganda yang menekankan prestasi dan kebijakan positif pemerintah menjadi alat utama dalam membangun citra positif Soeharto. Konsep gotong royong, atau kerja sama kolektif, menjadi fokus dalam komunikasi politik. Pesan ini digunakan untuk membangun solidaritas dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Komunikasi politik orde baru juga mencakup penanganan konflik etnis dan politik identitas. Pemerintah berupaya meredam ketegangan etnis dan menonjolkan konsep ke-Bhinnekaan (berbeda-beda namun tetap satu). Pemilihan umum selama Orde baru terkendali, dan partai politik dibatasi untuk memastikan dominasi politik oleh Golkar, partai resmi yang mendukung Soeharto. Kritik terhadap pemerintah atau presiden dihukum dengan tegas. Kebebasan berpendapat dan pers dikekang, dan oposisi politik dibungkam. Organisasi seperti Pemuda Pancasila dan Golkar memainkan peran besar dalam mendukung komunikasi politik pemerintah. Mereka membantu menyebarkan pesan-pesan pemerintah dan memobilisasi massa. Meskipun pemerintahan Orde baru berhasil mencapai kemajuan ekonomi dan stabilitas politik, pendekatan otoriter dan pembatasan terhadap kebebasan sipil menciptakan ketidakpuasan di antara masyarakat. Era ini berakhir pada tahun 1998 sebagai hasil dari reformasi dan perubahan politik yang mendalam di Indonesia.

Sejarah komunikasi politik kelima pada era reformasi: pasca jatuhnya rezim Orde baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi politik. Media massa berkembang pesat, dan kebebasan berpendapat semakin diakui. Pemilihan umum yang lebih terbuka dan dinamika politik yang lebih plural mendorong peningkatan peran media dalam membentuk opini publik. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Periode ini ditandai dengan perubahan besar dalam sejarah komunikasi politik di Indonesia. Kebebasan pers dan demokratisasi media: salah satu aspek paling mencolok dari era reformasi adalah meningkatnya kebebasan pers dan demokratisasi media. Banyak pembatasan yang diberlakukan oleh orde baru dicabut, memungkinkan munculnya media baru yang lebih bebas dan kritis. Dengan berkembangnya teknologi informasi, terjadi ledakan media baru, terutama online. Situs berita, blog, dan platform media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi politik dan memberikan platform bagi partisipasi warga dalam diskusi politik. Era Reformasi menyaksikan proses pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Kandidat dari berbagai latar belakang dan

partai politik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing dan terpilih. Era reformasi membawa pertumbuhan pluralisme politik dan munculnya berbagai partai politik. Meskipun menandakan perkembangan demokratisasi, hal ini juga menyebabkan polarisasi politik di antara berbagai kelompok dan ideologi.

Aktivisme online dan kampanye politik pada media sosial menjadi alat utama dalam kampanye politik dan aktivisme online. Partai politik, calon, dan kelompok masyarakat menggunakan platform ini untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, memobilisasi dukungan, dan menyuarakan isu-isu politik. Peran pemuda dan aktivis muda dimana Pemuda memainkan peran penting dalam menggerakkan perubahan politik. Aktivis muda, terutama yang terlibat dalam reformasi, membawa semangat perubahan dan kepemimpinan baru dalam komunikasi politik. Era reformasi melihat perkembangan organisasi masyarakat sipil yang lebih kuat dan aktif dalam mengawasi pemerintah, memperjuangkan hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Pemimpin politik mulai mengadopsi gaya komunikasi yang lebih terbuka dan mengedepankan dialog dengan masyarakat. Pidato-pidato dan komunikasi resmi menjadi lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik. Pemilihan umum menjadi momen penting untuk komunikasi politik. Penggunaan media sosial oleh kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan platform politik, dan memobilisasi dukungan menjadi praktik umum. Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam paradigma komunikasi politik di Indonesia. Kebebasan media dan partisipasi yang lebih besar dari berbagai kelompok masyarakat telah mengubah cara politik diartikulasikan, dipahami, dan dijalankan di Indonesia.

Pengaruh Media Sosial (Ismail, 2010) (Widaswara & Jelantik, 2022), perkembangan teknologi membawa masuknya media sosial. Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi politik, memobilisasi massa, dan memungkinkan partisipasi publik yang lebih aktif. Pemilihan Umum dan Politik Identitas: Pemilihan umum di Indonesia menjadi momen penting dalam komunikasi politik. Strategi kampanye, debat politik, dan interaksi kandidat dengan pemilih semuanya menjadi bagian integral dari komunikasi politik modern di Indonesia. Politik identitas, termasuk suku, agama, dan regionalisme, juga memiliki dampak besar. Isu-isu kontemporer: Seiring dengan perkembangan global, isu-isu kontemporer seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi menjadi pusat perhatian dalam komunikasi politik di Indonesia. Sejarah komunikasi politik di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan perubahan

sosial yang terjadi selama beberapa dekade. Transformasi media dan pergeseran kebijakan politik berkontribusi pada evolusi cara pesan politik disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

SIMPULAN

Komunikasi politik dalam konteks sejarah dimulai dari era kolonial dimana pada masa penjajahan Belanda, komunikasi politik di Indonesia terbatas oleh kontrol pemerintah kolonial terhadap media dan informasi. Meskipun demikian, gerakan nasionalis mulai menggunakan media cetak, seperti surat kabar, sebagai sarana menyebarkan ide kemerdekaan. Sejarah komunikasi politik kedua pada era perjuangan kemerdekaan: selama perang dunia ii dan masa perjuangan kemerdekaan, komunikasi politik menjadi krusial dalam membentuk kesatuan dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Radio Republik Indonesia (RRI) muncul sebagai saluran komunikasi yang penting pada periode ini. Sejarah komunikasi politik ketiga pada era orde lama: Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno, propaganda politik menjadi alat utama dalam membentuk opini publik. Pidato politik di stadion dan penggunaan media massa seperti surat kabar dan radio digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Sejarah komunikasi politik keempat pada orde baru: pada masa orde baru di bawah Soeharto, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap media. Pidato Soeharto dan penekanan pada "Pancasila sebagai ideologi negara" menjadi pola dominan dalam komunikasi politik. Televisi menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan pemerintah. Sejarah komunikasi politik kelima pada era reformasi: pasca jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komunikasi politik. Media massa berkembang pesat, dan kebebasan berpendapat semakin diakui. Pemilihan umum yang lebih terbuka dan dinamika politik yang lebih plural mendorong peningkatan peran media dalam membentuk opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. (2022). Sejarah Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. CV Widina.
- Budiyono, B. (2015). Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial. JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 17(2), 143. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.17.2.2015.143-160>
- Eny Inti Suryani. (2018). Komunikasi Politik: Asal Usul Dan Konsepsi. Komunikasi Politik: Asal Usul Dan Konsepsi, 2(2), 121–131.
- Heryanto, G. G., & Rumar, S. (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. In Ghalia Indonesia (pp. 1–196).
- Ismail, F. (2010). Komunikasi Politik di Era Industri Citra (1st ed.). PT Lasswell Visitama.

- Jelantik, S. K. (2020). Retorika Politik Calon Legislatif Hindu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Pemilihan Umum 2014. *Media Bina Ilmiah*, 10(1), 54–75.
- Jelantik, S. K. (2021). Komunikasi Konseling Pada Program Dharma Wacana Dan Dharma Tula Di Dusun Ngis Kecamatan Narmada. *Sadharanikarana*, 3(1), 407–420.
- Jelantik, S. K. (2022). Etika Komunikasi Bisnis Sarati Banten di Kota Mataram. 1(1), 35–46.
- Jelantik, S. K., & Astraguna, W. (2023). Analisa Proses Komunikasi Pariwisata Berbasis Moderasi Beragama Di Desa Wisata Sade Lombok Tengah. *Paryatāka : Jurnal Pariwisata Budaya Dan Keagamaan*, 1(2), 75–83. <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id>.
- Suparno, B. A. (2014). Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–12. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/64>
- Tobroni, R. (2017). Komunikasi Politik Mohammad Natsir. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i1.1208>
- Widaswara, R. Y., & Jelantik, S. K. (2022). Branding Desa Wisata Toleransi Buwun Sejati Melalui Berita Online Mandalika Post. *Widya Sandhi Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya*, 13(2), 75–84. <https://doi.org/10.53977/ws.v13i2.790>